

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA



**TAHUN
2024**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan prioritas pembangunan Tahun 2024 yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Juli 2023



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Juli 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 266



Tabel.T-II.61
Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Natuna 2020-2022

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi			Jumlah Anggota		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Midai	4	4	4	139	139	139
2.	Suak Midai	0	0	0	0	0	0
3.	Bunguran Barat	3	3	3	126	121	121
4.	Bunguran Utara	1	1	1	39	39	39
5.	Pulau Laut	2	2	2	146	146	146
6.	Pulau Tiga	5	5	5	121	121	121
7.	Bunguran Batubi	1	1	1	51	51	51
8.	Pulau Tiga Barat	3	3	3	128	128	128
9.	Bunguran Timur	24	24	31	2.377	2.353	2.779
10.	Bunguran Timur Laut	5	5	5	147	150	150
11.	Bunguran Tengah	1	1	1	36	31	31
12.	Bunguran Selatan	4	4	4	129	129	129
13.	Serasan	4	5	5	457	515	515
14.	Subi	2	3	3	167	192	192
15.	Serasan Timur	2	2	2	90	90	90
Natuna		61	63	70	4.113	4.205	4.631

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2023

Sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, perkembangan Badan Usaha Koperasi di wilayah Kabupaten Natuna telah berjalan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Natuna. Kondisi seperti ini disamping membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga harus mampu menjadi penyokong perekonomian rakyat dalam upaya menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Sektor industri bukan merupakan sektor dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Natuna, namun sektor tersebut paling sensitif dalam merespon pertumbuhan investasi. Potensi sektor industri di Kabupaten Natuna masih didominasi oleh sektor industri kecil. Sehingga belum mampu secara optimal menyerap investasi di kabupaten Natuna. Beberapa kendala dan permasalahan di bidang investasi daerah adalah berkaitan dengan upaya penciptaan iklim penanaman modal yang sehat seperti berikut; (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna yang belum bisa menjadi magnet kalangan investor untuk



menanamkan modalnya di Kabupaten Natuna; (2) Masih dijumpainya tumpang tindih koordinasi antar instansi terkait penanganan kegiatan investasi; (3) Masih belum memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam mendukung investasi daerah.

Tabel.T-II.62
Evaluasi Pencapaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Penanaman Modal Tahun 2022

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2022			Status
			Target	Realisasi	Capaian	
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
1.	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	Promosi	1	1	100	Tercapai
2.	Kenaikan Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	11,99	13,93	116,18	Tercapai
3.	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Koordinasi	125	131	104,8	Tercapai
4.	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	1	0	0	Belum Tercapai
5.	Laporan Realisasi Penanaman Modal	Laporan	4	4	100,0	Tercapai
6.	Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	1	0	0	Belum Tercapai
7.	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	Perusahaan	46	58	126,09	Tercapai
8.	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Izin	500	2334	466,80	Tercapai
9.	PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda	1	1	100	Tercapai
10.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	11,99	13,93	116,18	Tercapai
11.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal	SOP	1	1	100,0	Tercapai
12.	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Peizinan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	100,0	Tercapai

Indikator kinerja bidang Penanaman Modal yang belum tercapai pada tahun 2022 diantaranya adalah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Moda dan Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan oleh belum terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal karena keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar *stakeholder* terkait, dan belum adanya jadwal pelaksanaan Diklat Penanaman Modal pada tahun 2022. Tindak lanjut dari permasalahan ini dengan cara memprioritaskan ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal dan meningkatkan koordinasi antar *stakeholder*.

Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah		
						I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
						K	RP DPPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
2.17.05.2.01.01.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeropasan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeropasan	Orang	25	404.200.000	0		0	0	42.639.600	103	219.685.500	0	46.379.500,00	103	308.704.600	412,00	76,37	103,00	308.704.600	412,00	26,84	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2.1 7.07.		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	PERSENTASE USAHA MIKRO	Persentase	6,67	1.024.496.320	0	8.400.000	0	37.920.985	0	41.850.846	7,10	721.980.116	7,10	810.151.947	106,45	79,08	7,10	810.151.947	119,33	8,92		
2.17.07.2.01.		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Jumlah usaha mikro yang dilimpuk ke dalam sistem data online (ODS)	UMKM	3044	1.024.496.320	0	8.400.000	0	37.920.985	5	41.850.846	3526	721.980.116	3.531	810.151.947	116,00	79,08	3.531	810.151.947	108,85	8,92		
2.17.07.2.01.01.		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	Unit Usaha	1	526.000.000	-	-	-	-	-	8	523.600.000	3	523.600.000	300,00	99,54	3,00	523.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro		
2.17.07.2.01.02.		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Relelisasi Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	120	263.500.000	0	-	0	0	0	103	81.423.900	103	81.423.900	85,83	30,90	103,00	81.423.900	1.030,00	1,03	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro		
2.17.07.2.01.04.		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	2	234.996.320	0	8.400.000	0	37.920.985	1	41.850.846	3	116.956.216	3	205.128.047	150,00	87,29	3,00	205.128.047	30,00	20,51	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
2.1 8.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN													-									
2.1 8.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI	Persentase	80	5.678.134.209	78,06	1.205.305.589	78,06	1.288.915.712	78,06	1.430.038.945	100,00	1.584.547.901	100,00	5.508.808.147	125,00	97,02	100,00	5.508.808.147	111,11	16,94		
2.18.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4.723.142.471	1	1.002.822.113	1	1.074.351.468	1	1.225.920.993	1	1.283.639.680	1	4.586.734.254	100,00	97,11	1,00	4.586.734.254	100,00	17,15		
2.18.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	34	4.723.142.471	34	1.002.822.113	34	1.074.351.468	34	1.225.920.993	34	1.283.639.680	34	4.586.734.254	100,00	97,11	34,00	4.586.734.254	100,00	17,15	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana	Persentase	75	346.853.958	65	53.384.997	65	77.168.970	65	65.487.070	65	140.934.687	65,00	336.975.724	86,67	97,15	65,00	336.975.724	86,67	17,28		
2.18.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.160.000	1	1.700.000	1	4.090.000	1	2.940.000	1	6.220.000	1	14.950.000	400,00	78,03	4,00	14.950.000	80,00	59,80	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	44.000.000	0	0	0	0	0	-	2	43.713.514	2	43.713.514	100,00	99,35	2,00	43.713.514	40,00	48,57	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	8.500.000	1	4.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	1	445.000	4	8.445.000	400,00	99,35	4,00	8.445.000	80,00	14,08	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.136.000	1	2.236.000	1	0	1	1.908.000	1	3.828.000	4	7.972.000	400,00	97,98	4,00	7.972.000	6,90	13,29	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6000	14.880.876	2.000	5.428.500	2.000	1.309.000	2000	4.303.500	2	3.780.000	6.002	14.821.000	100,03	99,60	6.002,00	14.821.000	60.020,00	6,59	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	6.000.000	0	0	5	2.000.000	5	1.350.000	5	1.650.000	15	5.000.000	100,00	83,33	15,00	5.000.000	300,00	8,33	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Laporan	4	40.000.000	1	11.000.000	1	3.000.000	1	11.000.000	1	15.000.000	4	40.000.000	100,00	100,00	4,00	40.000.000	80,00	13,33	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	48	206.177.080	5	29.020.497	11	65.769.970	8	40.985.570	14	66.298.173	38	202.074.210	79,17	98,01	38,00	202.074.210	30,40	17,88	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna Daerah	Persentase	80	518.089.600	65	127.941.390	65	122.104.054	65	132.809.281	65	131.172.852	65,00	514.027.577	81,25	99,22	65,00	514.027.577	81,25	15,50		
2.18.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	51.100.000	3	11.127.396	3	9.835.060	3	11.540.287	3	14.576.658	12	47.124.401	600,00	92,22	12,00	47.124.401	80,00	13,40	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	466.989.600	24	116.768.994	24	112.268.994	24	121.268.994	24	116.596.194	72	466.903.176	300,00	99,98	72,00	466.903.176	1.440,00	15,74	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Sarana dan Prasarana	Persentase	75	90.048.180	40	21.157.089	40	15.291.220	50	5.821.601	65	28.800.682	65,00	71.070.592	86,67	78,93	65,00	71.070.592	86,67	14,31		
2.18.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pegawai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diawakan Paket dan Perizinan	Unit	5	55.408.180	2	18.407.089	3	14.716.220	3	2.746.601	3	13.022.617	11	48.892.527	220,00	88,24	11,00	48.892.527	220,00	12,22	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.01.2.09.11.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	34.640.000	5	2.750.000	1	575.000	6	3.075.000	6	15.778.065	18	22.178.065	360,00	64,02	18,00	22.178.065	24,00	22,18	Dinas Penanaman Modal dan	
2.1 8.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN	PERSENTASE PENINGKATAN	Persentase	10	496.000	12	496.000	12,89	0	12,28	0	12,28	0	496.000	122,88	100,00	12,28	496.000	97,77	0,02			
2.18.02.2.02.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi/Investasi	Peta	1	496.000	0	496.000	0	0	0	0	0	0	0,00	496.000	-	100,00	-	496.000	-	0,02		
2.18.02.2.02.02.		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	496.000	0	496.000	0	0	0	0	0	0	0	496.000	-	100,00	-	496.000	-	0,02	Dinas Penanaman Modal dan	
2.1 8.03.		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTOR	Investor	80	39.850.000	15	850.000	20,20	0	22,92	36.409.684	22,92	0	22,92	37.259.684	28,65	93,50	22,92	37.259.684	28,65	2,10		
2.18.03.2.01.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang	Jumlah Investor yang masuk	Investor	80	39.850.000	0	850.000	0	0	59	36.409.684	59	0	59,00	37.259.684	73,75	93,50	59,00	37.259.684	69,41	2,10		
2.18.03.2.01.02.		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	39.850.000	0	850.000	0	1	36.409.684	0	0	1	37.259.684	20,00	93,50	1,00	37.259.684	10,00	2,10	Dinas Penanaman Modal dan		
2.1 8.04.		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	Indeks	3	230.116.000	3,42	37.423.153	3,38	37.940.000	3,48	63.734.950	3,54	44.324.000	3,54	183.422.103	118,00	79,71	3,54	183.422.103	101,14	9,08		
2.18.04.2.01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	Waktu Proses Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	Hari	2	230.116.000	1,60	37.423.153	1,70	37.940.000	2,01	63.734.950	1,81	44.324.000	1,81	183.422.103	90,50	79,71	1,81	183.422.103	126,67	9,08		
2.18.04.2.01.01.		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1500	184.805.000	353	30.423.153	2,286	21.784.000	1120	48.619.700	0	37.824.000	3.759	138.650.853	250,60	75,03	3.759,00	138.650.853	127,08	10,02	Dinas Penanaman Modal dan	
2.18.04.2.01.03.		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mem peroleh Layanan Konsultasi dan Teknologinya Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	100	45.311.000	31	7.000.000	37	16.156.000	34	15.115.250	19	6.500.000	121	44.7								